

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara)**

**ABSTRAK  
I R N A W A T I \***

Korban penyalahgunaan narkotika tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, atau dipaksa. Perlakuan yang sama antara pecandu, penyalahguna, korban, serta bandar/pengedar menimbulkan ketidakadilan. Menurut Menteri Hukum dan HAM, penyalahguna seharusnya tidak dipidana penjara. Tesis ini mengkaji pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika, serta penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dari perspektif HAM di Polda Sumut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam uu narkotika serta, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dlm perspektif Hak Asasi Manusia di Kepolisian daerah Sumatera Utara..

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana dalam memperoleh data penulis melakukan studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan studi empiris dengan melakukan wawancara..

Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama; dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 butir 15 menyebutkan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 dan Pasal 54, Pasal 128. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Ketiga; SEMA Nomor 3 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 609. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika haruslah memenuhi beberapa syarat antara lain: melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; mampu bertanggungjawab, melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati dan tidak adanya alasan pemaaf. Sanksi dalam Undang-Undang Narkotika berupa sanksi pidana penjara dan sanksi berupa tindakan. Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Selain ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika, maka dapat juga diberikan sanksi tindakan yakni dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, upaya rehabilitasi perlu dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih manusiawi daripada hanya mengandalkan sanksi pidana. Program rehabilitasi berbasis pendekatan kesehatan dan kesejahteraan sejalan dengan HAM. Di Polda Sumut, aspek penting meliputi perlakuan adil tanpa diskriminasi, hak atas layanan kesehatan, rehabilitasi sebagai opsi manusiawi, serta perlindungan privasi dan martabat individu. Dengan memperhatikan hal tersebut, penegakan hukum akan selaras dengan prinsip-prinsip HAM.

**Kata Kunci : Penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika, HAM**

**ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF  
NARCOTICS ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS  
(Case Study at the Directorate of Drugs of the North Sumatra  
Regional Police)**

**ABSTRACT**

**IRNAWATI\***

*victims of drug abuse do not intentionally use drugs because they are persuaded, tricked, or coerced. Equal treatment between addicts, abusers, victims, and dealers creates injustice. According to the Minister of Law and Human Rights, abusers should not be sentenced to prison. This thesis examines legal arrangements, criminal liability in the Narcotics Law, and law enforcement against drug abusers from a human rights perspective in the North Sumatra Regional Police.*

*This study aims to determine the legal arrangements for narcotics abusers, criminal liability for narcotics abusers in the Narcotics Law and law enforcement against narcotics abusers from the perspective of human rights in the North Sumatra Regional Police.*

*The research methods used are normative juridical and empirical juridical, where in obtaining data the author conducts literature studies in the form of legislation and empirical studies by conducting interviews.*

*The research results of this thesis include: Legal arrangements for perpetrators of narcotics abuse are contained in several laws and regulations. First; in Narcotics Law Number 35 of 2009 Article 1 point 15 states that narcotics abuse is a person who uses narcotics without the right or against the law. Article 112 and Article 54, Article 128. Second, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2010 Third; SEMA Number 3 of 2011 and Law Number 1 of 2023 Article 609. Criminal liability for perpetrators of narcotics abuse in the Narcotics Law must meet several conditions, among others: committing a criminal act, the act is against the law; capable of responsibility, committing the act intentionally or due to negligence / lack of caution and the absence of excuses. Sanctions in the Narcotics Law are in the form of imprisonment and sanctions in the form of actions. Criminal sanctions and fines for anyone who misuses narcotics or psychotropic substances are contained in the criminal provisions in Chapter XV starting from Article 111 to Article 148. In addition to the criminal provisions that can be imposed on victims of narcotics abuse, it can also be given sanctions of action, namely by rehabilitation for narcotics addicts. In law enforcement against drug abuse, rehabilitation efforts need to be considered as a more humane alternative than relying solely on criminal sanctions. A rehabilitation program based on a health and welfare approach is in line with human rights. In Polda Sumut, important aspects include fair treatment without discrimination, the right to health services, rehabilitation as a humane option, and protection of individual privacy and dignity. By taking these into account, law enforcement will be in line with human rights principles.*

**Keyword : Law enforcement, narcotics abuse, human rights**

---

*\*Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*